

**KEPEMIMPINAN BUPATI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
(STUDI KASUS BUPATI NENENG HASANAH YASIN 2012-2018)**

Refa Viliani
NPP. 30.0578

*Asdaf Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Program Politik Indonesia Teraan*

Email : refavkaryodiharjo@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Women's feminist leadership produces a sympathetic approach. This is supported by the factor that women not only take care of themselves but also their social environment. Therefore, there is a need for awareness in gender equality and political rights between men and women today.*
Objective: *The purpose of this study is to determine the leadership of the first female Regent in Bekasi Regency, West Java Province.*
Method: *This research uses qualitative methods. The author uses observation, interview and documentation techniques. The data that has been collected is then analyzed by collecting data, analyzing data, and drawing conclusions.*
Results / Findings: *The results obtained by the author are how the leadership of the first female Regent in Bekasi Regency, West Java Province, the characteristics of her leadership, the achievements of Bekasi Regency during her leadership to the factors or causes of her re-election in the second term. The leadership of the female Regent Neneng Hasanah Yasin is characterized as a woman who is more aware or concerned about matters concerning women and children, unpretentious and blusukan accompanied by other factors such as historical factors of her family. Even though as a female Regent where women themselves are famous for being gentle or using hearts and feelings in almost everything, the female Regent Neneng Hasanah Yasin proves that she still has a firm nature when carrying out her duties as a leader.*
Conclusion: *The leadership of the female Regent Neneng Hasanah Yasin is favored by the community because she has leadership traits that are close to the community, but remains firm as a leader.*

Keywords: *Leadership, Women Regent, Women's Leadership*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : Kepemimpinan perempuan yang *feminism* menghasilkan sebuah pendekatan simpatik. Hal ini didukung oleh faktor yaitu perempuan tidak hanya merawat dirinya sendiri melainkan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu perlunya kesadaran dalam kesetaraan gender dan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan di masa kini. **Tujuan :** Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan seorang Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pengumpulan data, menganalisis data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ Temuan :** Hasil yang didapatkan penulis adalah bagaimana kepemimpinan Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, ciri khas kepemimpinannya, prestasi Kabupaten Bekasi semasa kepemimpinannya hingga faktor atau penyebab kembali terpilihnya di periode kedua. Kepemimpinan Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin ciri khasnya sebagai perempuan lebih *aware* atau perhatian terhadap hal-hal yang menyangkut perempuan dan anak, bersahaja dan blusukan disamping adanya faktor-faktor lain seperti halnya faktor histories keluarganya. Meskipun sebagai seorang Bupati perempuan yang mana perempuan sendiri terkenal dengan sosok yang lemah lembut atau menggunakan hati maupun perasaan hampir dalam segala hal tetapi Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin membuktikan bahwa ia tetap memiliki sifat yang tegas ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. **Kesimpulan :** Kepemimpinan Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin disukai oleh masyarakat karena memiliki sifat kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, namun tetap tegas sebagai seorang pemimpin.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Bupati Perempuan, Kepemimpinan Perempuan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Demokrasi adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat (Dwi Sulisworo, et al 2012) Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu bentuk representasi dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 yang didasarkan pada berakhirnya masa jabatan kepala daerah masing-masing wilayah. Dalam ketentuan yang mulai berlaku di Pilkada 2015, peraih suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah, berapapun presentase perolehan suaranya. Dengan demikian penyelenggaraan Pilkada langsung secara serentak telah dilaksanakan pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. Berbagai kebijakan tersebut memberikan perlakuan *affirmative action* bagi perempuan dalam kegiatan politik

dengan dasar pemikiran bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan akan membawa masyarakat Indonesia kepada perubahan menuju sistem yang lebih berkeadilan (Apriani 2019). Adapun definisi singkat mengenai *affirmative action* pada (Putri 2013) adalah sebagai hukum dan kebijakan pemberian kompensasi dan keistimewaan terkait kasus-kasus tertentu untuk mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan-tindakan *affirmative action* yang dapat diusulkan untuk giat pilkada salah satunya yaitu perlunya penerapan kebijakan *affirmative action* dalam desain berupa aturan main penyelenggaraan pilkada serentak dengan cara mempermudah syarat pencalonan bagi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah perempuan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam Perempuan dan Pilkada (2018). Walaupun Undang-Undang politik untuk Pemilihan Umum telah diubah, kehidupan publik non-diskriminatif dan kemunculan perempuan dalam kekuasaan eksekutif yang telah ditempuh hingga kini, masih belum menunjukkan perubahan yang substansif dan dampak dalam skala (Jaweng 2014). Sistem pemilihan secara langsung memiliki peluang dan membuka kesempatan bagi perempuan dalam hal kontestasi untuk meraih jabatan politik sebagai pejabat publik. Pada dasarnya kesanggupan yang dimiliki oleh perempuan sebagai makhluk religius, individu, sosial dan budaya sebenarnya tidak berbeda dengan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan yang istimewa tentang kemampuan dasar kapasitas dari kedua jenis laki-laki dan perempuan (Habibah 2015). Jumlah calon perempuan dalam panggung Pilkada serentak 2015 belum menunjukkan adanya keseimbangan gender. Dari data yang diolah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), keberadaan perempuan calon kepala daerah tersebut tersebar di 90 dari 262 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Lebih rinci, perempuan mencalonkan di 76 dari 219 kabupaten, 14 dari 34 kota; serta 1 dari 9 provinsi (Sholikin 2016). Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang telah menyelenggarakan Pilkada langsung Tahun 2012 yang terdapat 3 (tiga) pasang calon kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di usung dari berbagai partai politik. Dari semua pasangan calon diatas, terdapat satu calon perempuan, yaitu Neneng Hasanah Yasin. Neneng merupakan istri dari Almaida Rosa Putra yang sekaligus putra mantan Bupati Bekasi Saleh Manaf. Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan kemudian pada tahun 2017 Neneng Hasanah Yasin kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati bersama Eka Supria Atmaja sebagai calon Wakil Bupati. Kembali terpilihnya Neneng Hasanah Yasin pada Pemilukada tahun 2017 tidak lain didukung oleh berbagai prestasi yang diraih selama menjabat Bupati Kabupaten Bekasi 2012-2018.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Perempuan yang sudah berhasil meraih posisi politik sebagai pejabat publik dianggap mampu menemukan cara untuk mengatasi masalah publik terutama masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Berdasarkan pemahaman tersebut maka ditetapkan kesenjangan masalah, sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi di tengah budaya korupsi.
2. Kepemimpinan Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin dalam menghindari faktor-faktor kegagalan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi tahun 2012-2018.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan Penelitian ini, penulis mengacu dan membandingkan temuan dari Penelitian sebelumnya. Nabila Nisa Syabrina (2018) Kepemimpinan Hj Ratu Tatu Chasanah Sebagai Bupati Kabupaten Serang (Studi Kasus Pelayanan Publik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak). Penelitian ini fokus membahas tentang kepemimpinan kepala daerah perempuan namun di daerah yang berbeda yaitu di Kabupaten Serang. Retnowati WD Tuti dan Sa'adiyah El Adawiyah (2020) (Kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini Sebagai Model Birokrasi Efektif). Penelitian ini lebih berfokus pada upaya kepemimpinan birokrasi Tri Rismaharini dalam menjalankan tugasnya. Rudi Hartono (2020) (Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi) dalam penelitian ini yang digali adalah kepemimpinan perempuan di era globalisasi secara universal dan tidak memiliki lokasi khusus dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan memfokuskan penelitiannya hanya pada kepemimpinan bupati Hasanah Yasin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang diangkat oleh penulis belum banyak dilakukan karena penelitian ini bersifat lokal dengan latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda. Pada penelitian ini penulis melakukan kajian pada. Penulis juga lebih memfokuskan penelitian pada Kepemimpinan Bupati Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Bupati Neneng Hasanah Yasin 2012-2018) .

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi, mengumpulkan data-data yang dibutuhkan guna mengungkap fakta di lapangan dengan tujuan mengkaji secara ilmiah terkait permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu tujuan dari rumusan masalah diatas yaitu:

- 1) Untuk mengetahui kepemimpinan Bupati Perempuan Neneng Hasanah Yasin dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi di tengah maraknya kasus korupsi yang kian terjadi khususnya pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati di Kabupaten Bekasi tahun 2012-2018
- 2) Untuk mengetahui bagaimana Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin dalam menghindari faktor-faktor kegagalan pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati di Kabupaten Bekasi tahun 2012-2018

II. METODE

Tujuan penelitian yang ingin menggali secara mendalam dan mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Mengenai fakta-fakta empiris tentang kepemimpinan bupati perempuan, studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Secara spesifik, penelitian ini akan mencoba untuk memahami bagaimana kepemimpinan Bupati perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat mampu menembus berbagai rintangan struktural. Sedangkan teknik pengumpulan datanya sendiri menekankan pada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan informasi ada 8 orang informan.

1. Mantan Bupati Kabupaten Bekasi (2012-2018)
2. Sekda Kabupaten Bekasi (2012-2018)
3. Kepala DPMPTSP (2012-2018)
4. Kabag Hukum Kabupaten Bekasi
5. Pakar Ilmu Pemerintahan/Politik 2 orang
6. Tokoh Masyarakat di Kabupaten Bekasi 2 orang

Dalam uji validitas data akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi. Menurut Miles & Huberman (1992) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara merangkum seluruh informasi yang berhubungan dengan strategi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, dalam hal ini strategi yang ditetapkan menyongsong pemilu legislatif tahun 2024 oleh partai politik. Hasil rangkuman tersebut kemudian diseleksi (eliminasi) berdasarkan kriteria yang lebih penting. Hal-hal penting tersebutlah akan menjadi fokus penelitian yang selanjutnya akan penulis gambarkan secara jelas. Adapun teknik penyajian data akan dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 6 hubungan antar informan, flowchart, dan sejenisnya yang berkaitan dengan Kepemimpinan Bupati Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Bupati Neneng Hasanah Yasin 2012-2018). Selanjutnya untuk penarikan kesimpulan akhir akan dilakukan dengan cara menjadikan hasil kajian data sebagai kesimpulan akhir yang didukung oleh data-data dan menetapkan kesimpulan awal sebagai kesimpulan akhir dengan catatan jika tidak terdapat perubahan yang signifikan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kepemimpinan Bupati Neneng Hasanah Yasin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan Dimensi Kepemimpinan menurut Hitt (1993): *Reasons, Sources of Power, Knowledge, Core Leadership Functions Character*. Dari dimensi inilah ditemukan beberapa fakta di lapangan.

3.1 Kepemimpinan Bupati Perempuan Neneng Hasanah Yasin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi di tengah maraknya kasus korupsi yang kian terjadi pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Perempuan di Kabupaten Bekasi tahun 2012-2018

A. Dimensi *Reasons*

Pada dimensi *Reasons* atau Nalar memiliki pengertian bahwa pada setiap pola pikir manusia akan dipenuhi oleh konsep dan sebuah fakta. Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin pada saat menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Bekasi memiliki sifat-sifat sebagaimana yang telah disebutkan didalam indikator dari dimensi ini seperti *Conceptual Skills, Logical Thinking, Creative Thinking, Holistic Thinking and Communication*. Yang mana komunikasi menjadi salah satu alasan yang parsial yang jika pada komunikasi tidak dapat berjalan baik maka semua urusan seiring berjalannya kegiatan tidak akan memberikan hasil atau dampak yang baik.

B. Dimensi *Sources of Power*

Pada dimensi *Sources of Power* atau Sumber Kekuasaan yang memiliki artian sebagaimana dianggap menjadi sesuatu yang penting dalam hal kepemimpinan yang efektif dikarenakan hal ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang maupun dalam hal kelompok. Indikator pada dimensi ini ada tiga yaitu *staff, Informations, Networks*. Tiga indikator dalam dimensi ini dilakukan secara baik oleh Bupati Neneng Hassanah.

C. Dimensi *Knowledge*

Pada dimensi *Knowledge* atau Pengetahuan dalam hal ini tentu saja seorang pemimpin dituntut untuk memiliki pengetahuan meskipun tidak semua informasi dapat dikuasai namun para pemimpin ini mempunyai tuntutan untuk dapat menyaring informasi yang penting. Adapun indikator pada dimensi ini ada 5 (lima) yaitu: *Knowing Oneself, Knowing the Job, Knowing the Business is in, Knowing the Organization, Knowing the World*. Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin jelas mengetahui potensi yang dimiliki dirinya. Hal ini adanya pengakuan dari masyarakat bahwa ia dapat memposisikan dirinya ketika menjadi istri dan seorang ibu dirumah dan ketika menjadi seorang Bupati. Disamping keahliannya dalam hal menjalankan organisasi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang menjadi tanggung jawabnya keseluruhan secara tidak langsung. Pengetahuan dalam organisasi ini juga didukung oleh fakta bahwa perjalanan karier Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin pada partai politik pengusungnya.

D. Dimensi *Core Leadership Functions*

Pada dimensi *Core Leadership Functions* atau biasa disebut dengan Fungsi Kepemimpinan Inti dimana dapat dijelaskan disini bahwa pemimpin yang efektif harus mampu mengangkat nilai-nilai pengikutnya dengan memberikan dorongan sehingga adanya “nilai baru”. Pemimpin dapat dikatakan efektif jika melaksanakan 6 (enam) indikator inti ini, diantaranya : *Valuing, Visioning, Visioning, Empowering, Team Building, Promoting Equality*.

E. Dimensi *Character*

Pada dimensi *Character* atau Karakter dimana memiliki definisi yaitu sebagai sifat, tabiat yang dikagumi sebagai suatu tanda kebaikan, kebajikan serta kematangan moral

yang ada atau melekat pada seseorang. Dimensi ini memiliki 6 karakteristik atau indikator sendiri diantaranya: *Identity, independence, Authenticity, Courage, Integrity*. Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin memberikan bukti bahwa dirinya memiliki ciri khas pada gaya kepemimpinannya ketika pada masa itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bekasi selain kemandirian, keberanian dan integritas yang ada selama ia menjabat sebagai Bupati perempuan untuk Kabupaten Bekasi.

3.2 Upaya Bupati Perempuan Neneng Hasanah Yasin dalam menghindari faktor-faktor kegagalan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi tahun 2012-2018

Catatan tentang keberhasilan dalam hal inovasi pemerintahan, baik yang telah dilakukan pada tingkat nasional maupun lokal telah banyak ditampilkan dan menjadi bagian dari distribusi itu sendiri. Kegagalan-kegagalan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut David L. Dotlich yaitu ada beberapa pengaruh faktor-faktor kegagalan pada kepemimpinan yang *pertama* yaitu, Arogansi atau memiliki pengertian yaitu memiliki perasaan dimana merasa dirinya yang paling benar, sehingga yang lain dianggap bisa selalu saja salah. Yang *kedua*, Melograma atau selalu ingin jadi *center of attention* dengan kata lain selalu ingin menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, *Volatility* atau sikap sulit ditebak dan bertindak sesuai dengan situasi. Yang keempat, *Excessive Caution* atau memiliki keraguan yang berlebihan dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan. Yang kelima, *Habitual Distrust* atau selalu bersikap penuh curiga dan tidak percaya kepada siapa pun, perasaan seperti ini sebenarnya tidak dibolehkan ada dalam hal kepemimpinan. Yang keenam, *Aloofness* atau sulit dihubungi dan berkomunikasi dengan orang lain. Memiliki sifat seperti ini tentunya tidak cocok dengan kepemimpinan. Yang ketujuh, *Mischievousness* yaitu adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan atau sistem tanpa adanya tindakan yang tegas. Yang kedelapan, *Eccentricity* atau selalu ingin tampil beda sehingga kadangkala dianggap aneh oleh orang lain. Yang kesembilan, *Passive Resistance* atau tidak yakin dengan apa yang dikatakan atau apa yang telah dipertahankan, dalam hal kepemimpinan harusnya hal-hal yang memiliki kesamaan dengan keraguan, ketidak yakinan tidak boleh dibiarkan karena jika terus dibiarkan berkembang hal ini dapat mempengaruhi pola pikir seorang pemimpin kedepannya. Yang kesepuluh, *Eagerness to Please* atau mengejar popularitas semata dalam setiap situasi. Secara pengertian sifat ini hampir sama dengan *volatility* dimana akan bertindak namun disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi tentunya hal ini bukan hal yang bagus karena secara tidak langsung tidak memiliki pedoman atau pendirian. Yang terakhir, *Perfectionism* atau perfeksionis memiliki pengertian yaitu seringkali menganggap kebanyakan atau mayoritas tindakan selain dari dirinya salah, yang memicu hal ini terjadi kadang yaitu ketidaksesuaian atas apa yang telah bawahannya kerjakan terhadap ekspektasi atau apa yang telah ia target dan bayangkan sebelumnya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait Kepemimpinan Bupati Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Bupati Neneng Hasanah Yasin 2012-2018). *Pertama*, Kepemimpinan Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin jika dimuat dari berita online atau platform media sosial yakni memiliki ciri khasnya sebagai perempuan dimana Bupati Neneng Hasanah Yasin lebih *aware* atau perhatian terhadap hal-hal yang menyangkut perempuan dan anak, disamping itu kepemimpinannya juga dikatakan bersahaja dan tidak sungkan untuk dekat secara langsung dengan warga masyarakat Kabupaten Bekasi hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil wawancara penulis dengan narasumber. *Kedua*, meskipun sebagai seorang Bupati perempuan yang mana perempuan sendiri terkenal dengan sosok yang lemah lembut atau menggunakan hati maupun perasaan hampir dalam segala hal tetapi Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin membuktikan bahwa ia tetap memiliki sifat yang tegas ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan juga memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin. *Ketiga*, Sebagai seorang pemimpin pasti memiliki *value, character, vision*, dan sifat atau karakteristik yang lainnya dimana dalam menyikapi hal ini kebanyakan Kepala Daerah pasti dapat menilai bagaimana nilai, karakter, ataupun pandangan terhadap para pegawai ataupun bawahannya juga. Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin pun tidak mau ada kasus tindak pidana korupsi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya terjadi pada lingkungan perkantoran pemerintahan Kabupaten Bekasi. *Keempat*, Kepemimpinan Bupati perempuan Neneng Hasanah Yasin dipengaruhi oleh karakteristik Bupati Neneng sendiri yang tegas, bersahaja dan *blusukan* disamping adanya faktor-faktor lain seperti halnya dari faktor *Histories* atau sejarah keluarganya yaitu merupakan anak perempuan dari Juragan terkenal di daerah Bekasi yaitu M.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa seorang perempuan juga mampu menjadi pemimpin yang berkualitas, walaupun memiliki hati yang lemah lembut tetapi seorang Bupati Neneng Hasanah tetap menunjukkan kepemimpinan yang tegas sehingga mampu bertindak secara tepat dalam memberantas korupsi di daerahnya. Meskipun ada beberapa faktor penghambat pada masa kepemimpinan beliau tetap berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku secara hukum, adat dan kebiasaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya terkait menganalisis dan berfokus pada data penelitian terkait kepemimpinan-kepemimpinan gubernur ataupun kepala-kepala daerah perempuan yang ada di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Mantan Bupati Kabupaten Bekasi (2012-2018), Sekda Kabupaten Bekasi (2012-2018), Kepala DPMPTSP (2012-2018), Kabag Hukum Kabupaten Bekasi, Pakar Ilmu Pemerintahan/Politik, Tokoh Masyarakat di Kabupaten Bekasi dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, F. (2019). Faktor Familialities Bagi Perempuan Pemimpin Dalam Tata Pemerintahan Daerah .
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, S. (2010). *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, L. (2011). Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan: Vol. IV.
- Handayani, F. A., & Mohamad, I. N. (2019). Implementasi Good Governance di Indonesia.
- Hartono, R. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- aweng. (2014). Perempuan Dalam Kabinet. *Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan* .
- Jónasdóttir, A. G., & Jones, K. B. (2008). *The Political Interests of Gender Revisited Redoing Theory and Research with a Feminist Face*.
- Khodijah, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Kepala Daerah Perempuan di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Indonesia Social Sains*.
- Labolo, M., Fadhilah, H. A., & Ilham, T. (2021). *Gender Politics and Political of Female Candidate in Lampung Province, Indonesia*.
- Meizara, & P., D. (2016). Analisis Kompetensi Kepemimpinan Wanita.
- Milles, & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Retnowati WD Tuti, dkk., (2020). Kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini Sebagai Model Birokrasi Efektif.
- Syabrina, N. N. (2018). Kepemimpinan Hj Ratu Tatu Chasanah Sebagai Bupati Kabupaten Serang (Studi Kasus Pelayanan Publik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak). *Kepala Daerah Perempuan*.

